

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang cukup berpotensi untuk menyokong penyelenggaraan pembangunan suatu bangsa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dilihat bahwa sumber penerimaan negara Indonesia sekitar 60 % sampai 70 %-nya berasal dari sektor pajak, seperti pada tabel 1.

Dalam tabel 1 memperlihatkan perkembangan penerimaan Pajak dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2007 merupakan puncak tertinggi penerimaan Pajak terhadap total penerimaan Negara. Namun, persentase kontribusinya menurun bila dibandingkan tahun 2003 yaitu menjadi 70,7%. Namun beberapa tahun sebelumnya, perkembangan penerimaan Perpajakan mengalami perubahan sekitar 10 hingga 14 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pajak masih merupakan sektor yang sangat penting dalam penerimaan negara. Meskipun selama dasawarsa 1990-2007 telah terjadi gejolak politik dan ekonomi, bahkan selama dasa warsa tersebut telah

terjadi lima kali masa pemerintahan, tetapi secara khusus peranan penerimaan pajak di Indonesia selama kurun waktu tersebut masih cukup dominan.

Dalam APBN, rincian penerimaan perpajakan terdiri dari tujuh komponen pajak, diantaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, pajak lain, bea masuk, dan pajak ekspor.

Tabel 1. Penerimaan Negara (pajak dan bukan pajak), 1990 – 2007 (miliar rupiah)

| Tahun anggaran | Perpajakan | % terhadap penerimaan | Bukan pajak | % terhadap penerimaan | jumlah |
|----------------|------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 1991/1992 | 24.919,3 | 58,5 | 17.662,7 | 41,5 | 42.582,0 |
| 1992/1993 | 30.091,5 | 61,6 | 18.771,1 | 38,4 | 48.862,6 |
| 1993/1994 | 36.665,1 | 65,3 | 19.448,0 | 34,7 | 56.113,1 |
| 1994/1995 | 44.442,1 | 66,9 | 21.975,9 | 33,1 | 66.418,0 |
| 1995/1996 | 48.686,3 | 66,7 | 24.327,6 | 33,3 | 73.013,9 |
| 1996/1997 | 57.339,9 | 65,4 | 30.290,4 | 34,6 | 87.630,3 |
| 1997/1998 | 70.934,2 | 63,2 | 41.341,3 | 36,8 | 112.275,5 |
| 1998/1999 | 102.394,4 | 64,8 | 55.648,0 | 35,2 | 158.042,5 |
| 1999/2000 | 125.951,0 | 61,6 | 78.481,6 | 38,4 | 204.432,6 |
| 2000 | 115.912,5 | 56,5 | 89.422,0 | 43,5 | 205.334,5 |
| 2001 | 185.540,9 | 61,7 | 115.058,6 | 38,3 | 300.599,5 |
| 2002 | 210.087,5 | 70,4 | 88.440,0 | 29,6 | 298.527,5 |
| 2003 | 242.048,1 | 71,0 | 98.880,2 | 29,0 | 340.928,3 |
| 2004 | 280.558,8 | 69,6 | 122.545,8 | 30,4 | 403.104,6 |
| 2005 | 347.031,1 | 70,3 | 146.888,3 | 29,7 | 493.919,4 |
| 2006 | 409200,4 | 64,3 | 227113,2 | 35,7 | 636313,6 |
| 2007 | 509.462,0 | 70,7 | 210.927,0 | 29,3 | 720.389,0 |
| Rata-rata | | 63,77 | | 36,23 | |

Sumber: nota keuangan dan RAPBN 2008

Pajak yang terkumpul dalam tabel 1 di atas merupakan kumpulan pajak pusat yang dikumpulkan dari setiap propinsi di Indonesia. Salah satu propinsi yang cukup potensial dalam menyumbang pajak adalah Propinsi Lampung. Berikut adalah jumlah penerimaan pajak pusat dari Propinsi Lampung.

Tabel 2. Penerimaan pajak di Propinsi Lampung 1989 – 2009 (miliar rupiah)

| Tahun | Jumlah penerimaan Pajak |
|-------|-------------------------|
| 1989 | JPP |
| 1990 | 278 |
| 1991 | 320 |
| 1992 | 350 |
| 1993 | 398 |
| 1994 | 470 |
| 1995 | 528 |
| 1996 | 554 |
| 1997 | 579 |
| 1998 | 628 |
| 1999 | 687 |
| 2000 | 918 |
| 2001 | 920 |
| 2002 | 986 |
| 2003 | 1.420 |
| 2004 | 1.670 |
| 2005 | 1.750 |
| 2006 | 1.760 |
| 2007 | 1.789 |
| 2008 | 1.793 |
| 2009 | 1.818 |

Sumber: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

Tabel 2 memperlihatkan jumlah penerimaan pajak di Propinsi Lampung pada periode 1989-2009. Penerimaan tertinggi adalah pada tahun 2009 dan terendah adalah pada tahun 1989. Terlihat dari pada tabel 2 bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikan penerimaan pajak.

Berbagai kebijakan dan reformasi dibidang perpajakan diindikasikan turut mempengaruhi peningkatan penerimaan perpajakan yang cukup pesat, salah satunya adalah reformasi di bidang pengawasan perpajakan atau yang lebih dikenal dengan reformasi perpajakan jilid pertama.

Reformasi perpajakan jilid pertama dimulai dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar pada 2002. Pembentukan kantor ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tiga pilar reformasi perpajakan, yaitu reformasi bidang administrasi perpajakan, reformasi bidang peraturan perpajakan dan reformasi pengawasan perpajakan. Sebagai pilot project, maka keberhasilan pembentukan Kantor Pajak Wajib Pajak Besar ini akan sangat memengaruhi kelanjutan program reformasi perpajakan secara keseluruhan.

Terdapat empat sasaran pokok dari reformasi perpajakan jilid pertama, yaitu:

Pertama, memperbaiki peraturan perundang-undangan. Perbaiki UU dengan spirit dan responsif antara hak dan kewajiban antara wajib pajak dan aparat.

Kedua, perbaiki struktur organisasi, standar prosedur operasional sehingga ada kepastian bagi proses pelayanan dan tata kelola yang baik, peningkatan efisien dan produktivitas.

Ketiga, membenahi basis data dan sistem teknologi informasi untuk menunjang potensi pajak. Hal ini untuk mencegah interaksi aparat dan wajib pajak yang tidak diperlukan.

Keempat, reformasi di bidang perbaikan dan mutu, kompetensi dan integritas pegawai pajak.

Sejak digulirkan pada 2002, reformasi perpajakan setidaknya telah berhasil mengubah institusi Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih baik. Indikator keberhasilan reformasi perpajakan dapat dilihat setidaknya dari dua hal mendasar

perubahan persepsi (image) masyarakat terhadap institusi Dirjen Pajak dan keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak.

Selanjutnya untuk memaksimalkan pengawasan perpajakan akan dibentuk komite pengawasan perpajakan. Komite pengawasan perpajakan bertugas untuk mengamati perpajakan, pengumpulan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dan menerima pengaduan dari masyarakat. Jadi, diharapkan dengan telah dilaksanakannya reformasi pengawasan perpajakan dapat meningkatkan kinerja Dirjen Pajak dalam meningkatkan penerimaan perpajakan.

Secara tak langsung, penerimaan daerah (termasuk pajak) dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu variabel-variabel ekonomi makro. Oleh karena itu, setiap tahunnya dalam merancang APBD, pemerintah daerah selalu memperhatikan pengaruh beberapa variabel makroekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak dunia, nilai tukar dan tingkat suku bunga.

Menurut Purwiyanto dan Tity Hernawati (2002: 71), tinggi rendahnya penerimaan pajak erat kaitannya dengan perkembangan variabel-variabel makro ekonomi antara lain; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, tingkat suku bunga, dan produksi minyak mentah dalam negeri. Hal ini terjadi karena variabel-variabel tersebut selain menjadi asumsi penting dalam menyusun kerangka kebijakan fiskal termasuk sektor penerimaan perpajakan juga mempunyai pengaruh terhadap aktivitas kegiatan perekonomian (dalam hal ini pajak daerah karena pengaruhnya terhadap harga, penawaran dan permintaan barang dan jasa).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator umum yang digunakan pemerintah daerah dalam menentukan baik buruknya pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi PDRB maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi dan demikian pula sebaliknya. PDRB sebagai dasar pengukuran yang menggambarkan dan memberi informasi tentang ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi memberikan stimulasi pada berbagai sektor dalam perekonomian misalnya peningkatan pada investasi, peningkatan pendapatan pada sektor riil, dan sebagainya. Adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat memacu peningkatan dalam penerimaan di sektor perpajakan.

Pada Tabel 3 menjelaskan perkembangan PDRB periode tahun 1989 sampai 2009. Nilai PDRB terus mengalami peningkatan, meskipun perkembangannya yang cukup fluktuatif. Peningkatan PDRB itu didukung oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi, investasi, ekspor maupun impor barang dan jasa pada setiap tahunnya, yang kesemuanya itu merupakan komponen pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran. Hal ini karena terjadi perkembangan yang cukup baik dari sektor riil di Propinsi Lampung.

Inflasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian. Perubahan inflasi yang fluktuatif dan terus menerus akan mempengaruhi keseimbangan dan stabilitas perekonomian secara global tidak terkecuali para pelaku ekonomi; masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

Tabel 3. Perkembangan PDRB di Propinsi Lampung 1989-2009 atas harga berlaku (juta rupiah)

| Tahun | PDRB |
|-------|---------------|
| 1989 | 2.872.942,92 |
| 1990 | 3.224.635,40 |
| 1991 | 3.653.941,14 |
| 1992 | 4.351.196,73 |
| 1993 | 5.368.315 |
| 1994 | 6.533.236 |
| 1995 | 8.119.193 |
| 1996 | 9.268.875 |
| 1997 | 10.570.468 |
| 1998 | 18.481.527 |
| 1999 | 21.867.544 |
| 2000 | 23.252.525 |
| 2001 | 25.693.710 |
| 2002 | 29.039.746 |
| 2003 | 32.339.919 |
| 2004 | 36.195.212 |
| 2005 | 40.906.789 |
| 2006 | 49.118.988.91 |
| 2007 | 60.921.966.22 |
| 2008 | 74.490.598.79 |
| 2009 | 80.215.230 |

Sumber: Lampung dalam angka berbagai edisi, BPS Propinsi Lampung.

Inflasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian.

Perubahan inflasi yang fluktuatif dan terus menerus akan mempengaruhi keseimbangan dan stabilitas perekonomian secara global tidak terkecuali para pelaku ekonomi; masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

Inflasi merupakan gejala kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Besarnya inflasi ditentukan oleh besarnya kenaikan harga secara umum. Inflasi dapat berakibat pada penurunan daya beli masyarakat dan kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4. Perkembangan Inflasi di Propinsi Lampung 1989-2009 (%)

| Periode | Tingkat Inflasi |
|---------|-----------------|
| 1989 | 6,52 |
| 1990 | 4,23 |
| 1991 | 5,45 |
| 1992 | 4,13 |
| 1993 | 10,43 |
| 1994 | 8,54 |
| 1995 | 9,12 |
| 1996 | 6,09 |
| 1997 | 10,70 |
| 1998 | 20,25 |
| 1999 | 15,34 |
| 2000 | 10,18 |
| 2001 | 12,97 |
| 2002 | 9,94 |
| 2003 | 5,44 |
| 2004 | 5,22 |
| 2005 | 21,17 |
| 2006 | 6,03 |
| 2007 | 6,58 |
| 2008 | 14,82 |
| 2009 | 6,40 |

Sumber: Lampung dalam angka berbagai edisi, BPS Propinsi Lampung

Tabel 4 menjelaskan perkembangan laju inflasi Propinsi Lampung. Laju inflasi terlihat berfluktuasi dari tahun ke tahun, tertinggi tahun 2005 dan terendah tahun 1992.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul skripsi “ **Pengaruh Reformasi Pengawasan Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak di Propinsi Lampung**”

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas penulis memperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak di Propinsi Lampung.
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap penerimaan pajak di Propinsi Lampung.
3. Bagaimana pengaruh reformasi pengawasan perpajakan terhadap penerimaan pajak di Propinsi Lampung.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penerimaan pajak di Propinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap penerimaan pajak di Propinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh reformasi pengawasan perpajakan terhadap penerimaan pajak di Propinsi Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang perpajakan dan manfaat dari reformasi perpajakan khususnya reformasi di bidang pengawasan perpajakan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi pembaca yang memerlukannya.

E. Kerangka Pemikiran

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan negara dari sektor pajak akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang menyangkut kepentingan umum (*public utilities*).

Pajak adalah pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Guritno, 2001: 181).

Menurut Purwiyanto dan Tity Hernawati (2002: 71), tinggi rendahnya penerimaan pajak erat kaitannya dengan perkembangan variabel-variabel makro ekonomi antara lain; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, tingkat suku bunga, dan produksi minyak mentah dalam negeri. Hal ini terjadi karena variabel-variabel tersebut selain menjadi asumsi penting dalam menyusun kerangka kebijakan fiskal termasuk sektor penerimaan perpajakan juga mempunyai pengaruh terhadap aktivitas kegiatan perekonomian (dalam hal ini pajak daerah karena pengaruhnya terhadap harga, penawaran dan permintaan barang dan jasa).

Perkembangan dunia usaha dipengaruhi berbagai macam faktor, salah satunya yaitu inflasi. Menurut ekonom Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, adanya pertumbuhan dunia usaha yang terhambat dan berat, karena pengusaha menaikkan harga barang jauh di atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), justru akan semakin memicu inflasi tinggi. Dalam jangka panjang, menurutnya kalangan dunia usaha banyak yang akan gulung tikar karena barang-barang produksinya kurang laku terjual. Selain karena harga yang tinggi, daya beli yang menurun menjadi penyebabnya. Karena produksi yang berkurang, pendapatan dari sektor perpajakan atas barang-barang tersebut sebagai objek pajak juga menurun.

Inflasi merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan. Dalam periode yang singkat, tingkat inflasi yang tidak terlalu tinggi berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan melalui naiknya nilai nominal dari pendapatan pajak dan konsumsi. Akan tetapi, dalam jangka waktu yang lebih panjang tingkat inflasi yang terlalu tinggi bisa berpengaruh negatif terhadap penerimaan perpajakan melalui pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi.

Berbagai kajian dan teoripun telah banyak dihasilkan oleh para ekonom sebagai solusi dari persoalan inflasi. Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi disebabkan masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dengan kata lain, inflasi terjadi karena pengeluaran agregat terlalu besar. Oleh karena itu, solusi yang harus diambil adalah dengan jalan mengurangi jumlah pengeluaran agregat itu sendiri (bisa dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau dengan meningkatkan pajak). Dari pernyataan di atas terlihat bahwa solusi dalam persoalan inflasi dapat

diatasi dengan meningkatkan penerimaan di sektor pajak. Dari teori tersebut diharapkan pajak yang meningkat akan berdampak terhadap berkurangnya jumlah pengeluaran agregat sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan batas kemampuan ekonominya.

Jika pajak meningkat menyebabkan tingkat inflasi yang menurun maka akan berlaku sebaliknya, meningkatnya inflasi akan berdampak pada penurunan dalam penerimaan pajak. Inflasi akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan jasa, hal tersebut akan berpengaruh pada daya beli yang rendah (pengeluaran agregat menurun) mengakibatkan penerimaan dari sektor pajak yang terkait barang dan jasa turut menurun.

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin dari peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan, bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam hal ini berarti terdapatnya kenaikan dalam pendapatan daerah yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam peningkatan nilai PDRB memberi sinyal positif bagi berbagai komponen dalam perekonomian, termasuk di dalamnya pendapatan daerah. Pertumbuhan Ekonomi merupakan sumber utama peningkatan standar hidup (*standard of living*) penduduk yang jumlahnya terus meningkat, dengan kata lain, kemampuan dari suatu negara untuk meningkatkan standar hidup penduduknya adalah sangat tergantung dan ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya (*long run rate of economic growth*) (Nanga, 2001).

Pertumbuhan ekonomi memberikan stimulasi pada berbagai sektor dalam perekonomian misalnya peningkatan pada investasi, peningkatan pendapatan sektor riil dan sebagainya. Pertumbuhan nilai PDRB dapat memicu peningkatan dalam penerimaan di sektor perpajakan.

Selain faktor-faktor eksternal seperti yang di jabarkan diatas, penerimaan perpajakan juga di pengaruhi oleh faktor internal yakni pembenahan sistem perpajakan itu sendiri atau dengan kata lain dengan melakukan perbaikan-perbaikan atau reformasi di bidang perpajakan.

Reformasi perpajakan jilid pertama dimulai dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar pada 2002. Pembentukan kantor ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tiga pilar reformasi perpajakan, yaitu reformasi bidang administrasi perpajakan, reformasi bidang peraturan perpajakan dan reformasi pengawasan perpajakan.

Sebagai pilot project, maka keberhasilan pembentukan Kantor Pajak Wajib Pajak

Besar ini akan sangat memengaruhi kelanjutan program reformasi perpajakan secara keseluruhan.

Data empiris, yang diambil dari survey AC Nielsen (2004), menunjukkan bahwa pelayanan pajak di kantor ini memberikan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 81, lebih besar dari rata rata tingkat kepuasan nasional sebesar 75.

Lebih lanjut Survey AC Nielsen Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepribadian pegawai pajak, kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan, jumlah pelayanan yang disediakan dan ketersediaan informasi di Kantor Pajak Wajib Pajak Besar-memiliki nilai sangat baik (LTRO Annual Report, 2004).

Sejak digulirkan pada 2002, reformasi perpajakan setidaknya telah berhasil mengubah institusi Direktorat Jenderal Pajak menjadi lebih baik. Indikator keberhasilan reformasi perpajakan dapat dilihat setidaknya dari dua hal mendasar perubahan persepsi (image) masyarakat terhadap institusi Ditjen Pajak dan keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Transparency International. Pada 2002 Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia mencapai 1,9 di mana ini berarti termasuk dalam kategori sangat korup.

Pada 2006, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia makin membaik yaitu mencapai 2,4. Terakhir pada 2008 Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia meningkat menjadi 2,6. Menurut hasil survei Transparency International Indonesia mengenai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, maka pada 2006 Ditjen Pajak masuk dalam kategori sebagai

intituti yang dinilai paling korup dengan tingkat inisiatif meminta suap mencapai 76%. Tahun 2008, Ditjen Pajak tidak masuk lagi dalam daftar institusi yang dinilai paling korup di Indonesia.

Selanjutnya untuk memaksimalkan pengawasan perpajakan akan dibentuk komite pengawasan perpajakan. Komite pengawasan perpajakan bertugas untuk mengamati perpajakan, pengumpulan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dan menerima pengaduan dari masyarakat. Jadi, diharapkan dengan telah dilaksanakannya reformasi pengawasan perpajakan dapat meningkatkan kinerja dinas perpajakan dalam meningkatkan penerimaan perpajakan.

F. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah:

Diduga bahwa:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Propinsi Lampung.
2. Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak di Propinsi Lampung.
3. Reformasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Propinsi Lampung.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari:

- Bab I. Pendahuluan. Bagian ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II. Tinjauan Pustaka. Berisikan Teori-teori yang sesuai dengan perpajakan, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan.
- Bab III. Metode Penelitian berisikan Jenis dan Sumber Data, Batasan Peubah, Alat Analisis serta Pengujian Hipotesis.
- Bab IV. Hasil Perhitungan dan Pembahasan berisikan Analisis
- Bab V. Simpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN